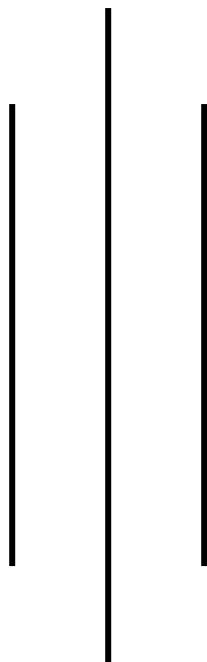


LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
Semester 2

TAHUN ANGGARAN 2019



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL**



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Jl. Laut Nomor 25 C Kendal Kode Pos 51351 Telp. / Fax. (0294) 381395

Kendal, Januari 2020

Kepada Yth :

Bupati Kendal

Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Kendal

Di-

KENDAL

SURAT PENGANTAR

Nomor : / /

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman LkjIP Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	1 (satu) bendel Dan Softcopy	Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL**

MOCHAMAD NOOR FAUZIE, ST.MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19641225.198802.1.003



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN

Jl. Laut Nomor 25 C Kendal Kode Pos 51351 Telp. / Fax. (0294) 381395

Kendal, Januari 2020

Kepada Yth :

Bupati Kendal

Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Kendal

Di-

KENDAL

SURAT PENGANTAR

Nomor : / /

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	1 (satu) bendel Dan Softcopy	Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL

MOCHAMAD NOOR FAUZIE, ST.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19641225.198802.1.003

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Kendal Nomor 159).

Sebagai instansi teknis yang bertanggungjawab kepada Bupati, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Mempunyai tugas membantu Bupati di dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

A. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis

Sebagian besar wilayah kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan wilayah geografis kabupaten Kendal yang terletak pada koordinat bujur timur = $109^{\circ} 40'$ – $110^{\circ} 18'$ dan lintang selatan = $6^{\circ} 32'$ – $7^{\circ} 24'$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kota Semarang
- Sebelah Selatan : Kab.Semarang dan Kab. Temanggung
- Sebelah Barat : Kab. Batang

Luas wilayah / tanah Kabupaten Kendal adalah $1.002,23 \text{ km}^2$ dengan ketinggian tanah dari permukaan laut :

- Bagian Utara : 0 s/d 10 m
- Bagian Selatan : 0 s/d 723 m

Suhu udara rata-rata :

- Wilayah bagian Utara : 27°C
- Wilayah bagian Selatan : 25°C

2. Aset dan Potensi Sarana dan Prasarana

Aset dan Potensi sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1	CCTV	2
2	KOMPOR GAS	2
3	TABUNG GAS	4
4	Mesin Penghancur Kertas	3
5	LASER POINNTER	2
6	Telpon/Fax, RUSAK	1
7	Telpon	4
8	PABX	1
9	Alat Pemadam Kebakaran	19
10	Mesin Potong Rmpt	1
11	Alat Penyemprot	1
12	AC	10
13	AC	8
14	Brankas	1
15	Filling Cabinet	14
16	Lemari Besi	1
17	Lemari Kaca	1
18	Lemari buku pintu Kaca	5
19	Lemari Katalog	1
20	Rak Arsip	19
21	RAK LAGAN	2
22	KORDEN	2

23	Meja Kursi Tamu	1
24	Microphone	4
25	Podium	3
26	Sound System	3
27	Sound System Aula Besar	1
28	Tangga Aluminium	2
29	Televisi	5
30	Wireless	1
31	GPS	2
32	Mobil Pick Up	1
33	Sepeda Motor	33
34	SPM/RODA TIGA	1
35	Station Wagon, rusak	5
36	Kursi Kerja Non Struktural	103
37	Kursi E 2	2
38	Kursi E 3	2
39	Kursi E 4	9
40	Lemari Pintu Sorong	23
41	Meja K Non Struktural	15
42	MEJA KERJA	13
43	Meja Kerja E 2	2
44	Meja Kerja E 3	2
45	Meja Kerja E 4	1
46	Meja Kursi Tamu Eselon II	1
47	Meja Kursi Tamu eselon III	1
48	Meja Kursi Tamu eselon III	1

49	Mesin absen jari	4
50	Mesin Ketik elektrik	2
51	Mesin Ketik	1
52	Kursi Rapat	410
53	Meja Komputer	4
54	Meja Rapat	12
55	Meja Aula	3
56	Meja Telpón	1
57	Meja Kayu	1
58	Meja Tulis	11
59	Harddisk Eksternal	2
60	Printer	20
61	Printer Dotmatrik	2
62	Printer a3	1
63	Printer laser	2
64	Harddisk Eksternal	2
65	Monitor, Baik	2
66	LCD Proyector	6
67	Kamera Digital	9
68	Mesin Bor Listrik	1
69	Mesin Gerinda Tangan 4 Inchi	2
70	ToolSet Box Peralatan Pertukangan Toolkit	1
71	Drone	1
72	Lap Top	29
73	Notebook	1
74	P.C Unit/ Komputer PC, Baik	13

3. Potensi Sumber Daya Manusia

SDM PNS

No	Jabatan	PNS Golongan Orang			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretaris	1			
3	Kepala Bidang	2			
4	Kasubag		2		
5	Kasie		4		
6	Kepala UPTD		1		
7	JFU		11	5	3
	Jumlah	4	18	5	3

SDM Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Tenaga Penjaga Malam	3
2	Tenaga Kebersihan	3
3	Tenaga Operator Sistem	3
3	Tenaga Penunjang bidang Perumahan	6
4	Tenaga adminitrasi Rusunawa	2
5	Tenaga Teknis Rusunawa	3
6	Tenaga Kebersihan dan Taman Rusunawa	8
7	Tenaga Penjaga Keamanan Rusunawa	6
8	Tenaga Penunjang Bidang Kawasan Permukiman	3
	Total Jumlah	37

(1). Menurut Pendidikan Terakhir dan jenis kelamin:

No	Jenjang	P	L	P+L
1	S-3			
.				
2	S-2	1	6	7
.				
3	S-1	6	6	12
.				

4	D-4	-	-	-
.
5	D-3	-	-	-
.
6	SMA	2	6	8
.
7	SMP	-	2	2
.
8	SD	-	1	1
.

Sumber ; Bagian Kepegawaian Dinas Perkim , 2019

(2).Menurut Pangkat/Golongan :

No	Jenjang	P	L	P+L
1	Golongan IV	-	4	4
.
2	Golongan III	7	11	18
.
3	Golongan II	2	3	5
.
4	Golongan I	-	3	3
.

Sumber ; Bagian Kepegawaian Dinas Perkim, 2017

(3).Menurut Jabatan :

No	Jenjang	P	L	P+L
1	Eselon II	-	1	1
.
2	Eselon III	-	3	3
.
3	Eselon IV	3	5	8

4	JFU	6	12	18
.				

Sumber ; Bagian Kepegawaian Dinas Perkim , 2019

B. Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Tugas :

- a) merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai peraturan
- g) menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja
- h) menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- i) menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j) mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- l) mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- n) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- o) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa.

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal , dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani oleh Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, karsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dan (2) Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan bidang .

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Maksud :

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas pengguna anggaran.

Tujuan :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Sistematika Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjukan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang dianggarkan dan yang telah terealisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mensukseskan program Pemerintah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , tujuan utama Pembangunan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraaan rakyat. Untuk memacu pencapaian tujuan pembangunan sebagai mana tersebut di atas, maka pelaksanaan tugas kegiatan pembangunan harus di laksanakan dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam arti setiap kegiatan disusun program yang sistematis dengan melihat kondisi lingkungan dan aspirasi masyarakat, sehingga tujuan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dapat meningkat. Untuk itu dalam mendukung terciptanya pencapaian kinerja di butuhkan kesamaan cara pandang terhadap visi dan misi organisasi.

1. Visi.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau suatu gambaran organisasi untuk menantang tentang masa depan berisikan cita-cita yang ingin di wujudkan . Untuk mengacu pada batasan tersebut visi Bupati Kendal Periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung Oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT”.**

2. Misi.

Pengertian misi adalah merupakan sesuatu yang harus di laksanakan (action) oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar cita-cita atau tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Guna mewujudkan kondisi dalam visi Bupati Kendal Kabupaten Kendal, maka di jabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih, bebas KKN
2. Menciptakan sumberdaya manusia yang cerdas, unggul serta berakhhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal.

6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan senibudaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

Dari Misi dan Misi tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengambil peran yaitu pada **Misi ke-8** yaitu :

Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

Dari Misi sebagaimana tersebut diatas, faktor pendukung dan penghambat dari dukungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal adalah :

Matrik persandingan faktor penghambat dan pendukug atas misi kedelapan.

No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Misi 8: Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Program yang akan dilaksanakan: 1) Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman aparatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku; • Masih banyaknya aparatur yang belum menguasai computer dan IT; • Belum meratanya kapasitas SDM dalam pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan permukiman yang masih rendah; • Kondisi sarana prasarana pendukung yang masih belum optimal untuk menjalankan tugas dan fungsi. 	Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang didukung dengan adanya amanat untuk menyediakan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; Adanya produk hukum (peraturan perundang- undangan yang menjadi acuan pelaksaaan

	<p>2) Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</p> <p>4) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial</p>	<p>pekerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang disiplinnya aparatur dalam pelaksanaan tugas; • Kompetensi SDM yang kurang sesuaiya penempatan SDM dengan latar belakang pendidikannya; • Masih adanya developer perumahan yang tidak berijin; • Masih adanya kawasan permukiman yang belum berijin; Masih adanya kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang belum tertangani; Masih adanya perumahan dan kawasan permukiman kumuh; Belum optimalnya penyediaan PSU perumahan; Masih adanya perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan 		<p>kegiatan); Dukungan pemerintah, baik pusat maupun provinsi dalam rangka mewujudkan target nasional 100-0-100; Keberadaan pengembang perumahan swasta yang berperan serta dalam membantu pemenuhan akan kebutuhan perumahan.</p>
--	--	---	--	--

		kecil yang belum bersertifikasi;		
--	--	----------------------------------	--	--

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan misi RPJMD yang ditetapkan dan permasalahan serta isu strategis dalam hal Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka Tujuan dan Sasaran selama kurun waktu 2016 – 2021, yaitu:

1. **Tujuan 1 :** Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja

Indikator sasaran : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja

2. **Tujuan 2 :** Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kinerja pelayanan

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran : Meningkatnya SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas

Indikator Sasaran : Persentase SDM yang mengikuti diklat/bimtek/workshop

3. **Tujuan 3 :** Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Indikator Tujuan : Cakupan infrastruktur yang berkualitas

Sasaran : Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan

Indikator Sasaran 1: Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator Sasaran 2: Persentase PSU perumahan dalam kondisi baik

Indikator Sasaran 2: Persentase Kawasan permukiman kumuh (%)

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja adalah efektifitas analis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang di inginkan di masa yang akan datang, pada prinsipnya rencana kinerja sesuatu penetapan tingkat pencapaian yang di nyatakan dengan ukuran indikator dalam rangka mencapai sasaran dalam target yang telah di tetapkan dalam kegiatan.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 meliputi :

1. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dengan tujuan secara terukur yang akan dicapai serta nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dari suatu proses perencanaan strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal. Dengan pengertian tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal menetapkan sasaran sebagai berikut:

- Terciptanya perencanaan, pengendalian, pembangunan yang tepat waktu, mutu dan sasaran.
- Tersedianya pembangunan fasilitas / sarana dan infrastruktur Daerah guna menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Terpeliharanya sarana dan prasarana sehingga dapat di manfaatkan secara optimal untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

2. KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian Misi 8 RPJMD adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan lapangan didasarkan pada dokumen yang ada
- pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase terutama pada drainase dilingkungan permukiman/perumahan
- peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di Kabupaten Kendal difokuskan pada penguragan wilayah kumuh
- Peningkatan kepemilikan rumah difokuskan pada penanganan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan pemberian stimulan pada penduduk yang memiliki rumah tidak layak huni
- optimalisasi pelayanan perijinan pembangunan dan pengembangunan kawasan permukiman
- PSU yang berkualitas pada perumahan terutama pada daerah pemukiman kumuh
- Penertiban peijinan perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil

3. STRATEGI

Strategi pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mencapai Misi RPJMD tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas
- meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui peningkatan ijin mendirikan bangunan sesuai peraturan yang berlaku, penataan, pembangunan, dan rehabilitasi bangunan dan prasarana lingkungan
- meningkatkan kepemilikan rumah melalui pembangunan rumah dan sarana dasar

- pada korban bencana, pembangunan rumah layak huni, pembangunan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
- Meningkatnya perijinan pengembangan perumahan melalui sosialisasi, dan pelayanan peijinan
 - Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui sertifikasi SKBG
 - Meningkatkan penanganan kawasan kumuh, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman kumuh dan pembangunan PSU Perumahan di kawasan kumuh

4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan Kegiatan yang di laksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
- 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Aset Tetap Lainnya

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD
- 4) Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

5. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

- 1) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran
- 3) Peningkatan Kinerja Pengelolaan website
- 4) Sosialisasi kinerja SKPD

6. Program Pengembangan Perumahan

- 1) Operasional Pokja Perumahan
- 2) Pendataan Perumahan Rakyat
- 3) Operasional pengelolaan rusunawa
- 4) Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa
- 5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- 6) Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum
- 7) Pendataan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan
- 8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa
- 9) Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 10) Migrasi tarif dasar listrik Rusunawa dari pasca bayar menjadi pra bayar (token)

7. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- 1) Penunjang Kawasan Kumuh
- 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

8. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- 1) Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas
- 2) Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 di susun untuk memenuhi dan sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pemerintah Kabupaten Kendal secara Periodik, sehingga terwujud suatu pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal yaitu Indikator masukan (input), Indikator keluar (Output), Indikator hasil (Outcome), Indikator manfaat (benefit).

Sasaran kinerja strategis yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan tersedianya sarana dan prasarana yang pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Sasaran kinerja strategis yang dicapai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja

- a. Prosentase unit kerja internal yang terlayani, dengan indikatornya adalah:
 - 1) Jumlah materai yang tersedia dalam 1 th
 - 2) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan air, listrik, dan telepon
 - 3) Jumlah bulan STNK kendaraan dinas/operasional yang dibayar
 - 4) Jumlah bulan alat kebersihan dan Tenaga Kebersihan yang dibayar
 - 5) Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
 - 6) Jumlah bulan barang cetakan yang dibayar
 - 7) Jumlah bulan bahan bacaan yang dibayar
 - 8) Jumlah bulan tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat
 - 9) Jumlah bulan adanya mobilisasi dalam dan luar daerah
- b. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikatornya adalah:
 - 1) Jumlah tersedianya aset peralatan dan mesin
 - 2) Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara secara rutin/berkala
 - 3) Jumlah bulan kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
- c. Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar, dengan indikatornya adalah:
 - 1) Jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja
 - 2) Jumlah buku laporan akhir tahun yang dibuat
 - 3) Jumlah evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan

- 4) Jumlah dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang tersusun
- d. Rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dengan indikatornya adalah:
- 1) Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - 2) Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan
 - 3) Jumlah website Dinas Perkim yang terpelihara
 - 4) Penyampaian program dan kegiatan dinas perkim kepada masyarakat
2. Persentase SDM yang mengikuti diklat/bintek/workshop bidang perumahan dan permukiman
- Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar, dengan indikatornya:
- Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
- a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni, dengan indikatornya:
- 1) Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasional pokja perumahan
 - 2) Jumlah dokumen data perumahan yang tersusun
 - 3) Jumlah bulan tersedianya biaya operasional pengelolaan rusunawa
 - 4) Jumlah bulan tersedianya perlengkapan kerja rusunawa
 - 5) Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi RTLH yang terlaksana
 - 6) Jumlah sarana prasarana pendukung rusunawa yang terbangun
 - 7) Jumlah token pra bayar yang terpasang
- b. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU dengan indikatornya:
- 1) Jumlah unit gedung yang disempurnakan
 - 2) Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi aset PSU Perumahan yang berhasil diserahterimakan
 - 3) Jumlah dokumen PSU yang tersusun
4. Persentase kawasan kumuh yang tertangani
- a. Prosentase kawasan permukiman kumuh, dengan indikatornya :
- 1) Jumlah bulan tersedianya biaya operasional kegiatan penunjang kawasan kumuh
 - 2) Jumlah lokasi kawasan permukiman Kumuh perkotaan yang ditata
- b. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan, dengan indikatornya:
- 1) Jumlah orang yang difasilitasi dalam penyediaan rumah
 - 2) Jumlah desa yang meningkat kualitas kawasan permukiman

Analisis program dengan indikator kinerja kegiatan yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

N o	Program	Indikator Kinerja	Target Th. 2018	Target Th. 2019	Realisasi Th. 2019	Target RPJMD	Ket
Perumahan							
1	Program	Jumlah materai	725 lbr	650 lbr	650 lbr	4625 lbr	

	Pelayanan Administrasi Perkantoran	yang tersedia dalam 1 th					
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan air, listrik, dan telepon	12 bln	12 bln	12 bln	72 bln		
	Jumlah STNK dan TNKB kendaraan dinas/operasional yang dibayar	46 bh	40 bh	40 bh	274 bh		
	Jumlah bulan terpenuhinya alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bln	12 bln	12 bln	72 bln		
	jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	72 bln		
	Jumlah bulan barang cetakan yang dibayar	12 kali	12 kali	12 kali	72 kali		
	Jumlah bulan bahan bacaan yang dibayar	12 bln	12 bln	12 bln	72 bln		
	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	544 pak	411 pak	411 pak	3803 pak		
	Jumlah bulan adanya mobilisasi dalam dan luar daerah	12 bln	30 laporan	30 laporan	72 bln		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah tersedianya aset peralatan dan mesin	27 unit	15 unit	15 unit	462 unit	
	Jumlah unit peralatan dan mesin yang	51 unit	40 unit	40 unit	557 unit		

		dipelihara secara rutin/berkala					
		jumlah bulan Kendaraan dinas / Operasional yang terpeliharanya	12 bln	12 bln	12 bln	72 bln	
4	Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan	55 org	55 org	55 org	455 stell	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja	12 laporan	12 laporan	16 laporan	132 laporan	
		jumlah buku laporan akhir tahun yang dibuat	5 buku	5 buku	5 buku	30 buku	
		jumlah evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan	12 laporan	12 laporan	5 laporan	73 laporan	
		jumlah dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang tersusun	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	
6	Program peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12 bln	12 bln	12 bln	36 bln	
		Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan	12 bln	12 bln	12 bln	72 bln	
		jumlah website Dinas Perkim yang terpelihara	1 website	1 website	1 website	4 website	
		Penyampaian	1 keg	1 keg	1 keg	4 keg	

		program dan kegiatan dinas perkim kepada masyarakat				
7	Program Pengembangan Perumahan	jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasional pokja perumahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
		Jumlah dokumen data perumahan yang tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
		Jumlah bulan tersedianya biaya operasional pengelolaan rusunawa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
		Jumlah bulan tersedianya perlengkapan kerja rusunawa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
		Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan monitoring dan kegiatan bantuan RTLH yang terlaksana	12 bln	12 bln	12 bln	48 bulan
		jumlah bulan pelaksanaan koordinasi aset PSU Perumahan yang berhasil diserahterimakan	12 bln	12 bln	12 bln	48 bln
		jumlah dokumen PSU yang tersusun	-	1 dok	1 dok	3 dok
		jumlah sarana prasarana pendukung rusunawa yang terbangun	-	1 unit	1 unit	3 unit
		Jumlah unit gedung yang	1 unit	1 unit	1 unit	4 unit

		disempurnakan				
		jumlah token pra bayar yang terpasang	-	196 unit	150 unit	196 unit
8	Program Lingkungan sehat perumahan	Jumlah bulan tersedianya biaya operasional kegiatan penunjang kawasan kumuh	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan
		jumlah lokasi kawasan permukimaan Kumuh perkotaan yang ditata	-	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi
9	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Jumlah orang yang difasilitasi dalam penyediaan rumah	500 org	100 org	100 org	1767 org
		Jumlah desa yang meningkat kualitas kawasan permukiman	57 desa	57 desa	57 desa	171 desa

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 Semester 2 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp 7.453.455.132,-** (tujuh milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dari pagu anggaran sebesar **Rp. 7.976.613.652;** (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam ratus ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran TA 2018

OPI: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Sisa Anggaran	Capaian Kinerja (%)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
PERUMAHAN						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa Surat menyurat	4,000,000.00	3,999,000.00	1,000.00	99.98
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91,000,000.00	72,101,844.00	18,898,156.00	79.23
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	15,000,000.00	11,512,925.00	3,487,075.00	76.75
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00
		Penyediaan alat tulis Kantor	75,000,000.00	71,959,000.00	3,041,000.00	95.95
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	18,000,000.00	16,208,000.00	1,792,000.00	90.04
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000.00	4,740,000.00	260,000.00	94.80
		Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000.00	24,870,000.00	130,000.00	99.48
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	225,295,267.00	225,150,010.00	145,257.00	99.94
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan aset peralatan dan mesin	116,000,000.00	78,165,000.00	37,835,000.00	67.38
		pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Mesin	48,500,000.00	48,463,000.00	37,000.00	99.92
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan Bangunan	40,000,000.00	39,663,000.00	337,000.00	99.16
		Pemeliharaan rutin / berkala aset tetap lainnya	115,000,000.00	112,080,598.00	2,919,402.00	97.46
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20,250,000.00	20,250,000.00	-	100.00
4	Kapasitas sumberdaya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	15,000,000.00	14,436,250.00	563,750.00	96.24
		Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan PNS/Pejabat	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi	10,000,000	10,000,000.00	-	100.00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
		Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
6	Program peningkatan Pelayanan dan Kinerja	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi	133,400,000.00	128,872,000.00	4,528,000.00	96.61
		Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	138,650,000.00	138,642,000.00	8,000.00	99.99
		Peningkatan kinerja pengelolaan website	20,000,000.00	19,608,000.00	392,000.00	98.04
		Sosialisasi kinerja SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100.00
7	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	10,000,000.00	9,403,000.00	597,000.00	94.03
		Operasional Pokja Perumahan	700,000,000.00	624,637,754.00	75,362,246.00	89.23
		Pendataan Perumahan Rakyat	100,380,000.00	100,206,431.00	173,569.00	99.83
		Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan	23,750,000.00	23,331,000.00	419,000.00	98.24

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Sisa Anggaran	Capaian Kinerja (%)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
		Penyusunan Perda Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan	136,418,000.00	127,182,140.00	9,235,860.00	93.23
		Operasional pengelolaan rusunawa	850,070,733.00	783,115,554.00	66,955,179.00	92.12
		Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa	87,918,000.00	87,283,000.00	635,000.00	99.28
		Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	260,000,000.00	258,250,000.00	1,750,000.00	99.33
		Penyempurnaan Sarana Prasarana Rusunawa	180,000,000.00	179,131,000.00	869,000.00	99.52
		Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Perumahan Rakyat	40,000,000.00	38,283,500.00	1,716,500.00	95.71
		Pembuatan Sistem Informasi Penyediaan Prasarana Sarana	50,000,000.00	48,666,500.00	1,333,500.00	97.33
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Rumah	281,000,000.00	263,349,000.00	17,651,000.00	93.72
		Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU)	89,548,000.00	76,125,266.00	13,422,734.00	85.01
		Study Pemilihan Lokasi untuk Perumahan Daerah PNS di	50,000,000.00	49,400,000.00	600,000.00	98.80
		Kajian lingkungan rusunawa kebondalem Kab Kendal	50,000,000.00	49,150,000.00	850,000.00	98.30
		Penyambungan listrik rusunawa pekerja kebondalem Kab Kendal	250,000,000.00	245,784,000.00	4,216,000.00	98.31
8	Program Lingkungan sehat perumahan	Penunjang Kawasan Kumuh	100,000,000.00	93,008,751.00	6,991,249.00	93.01
		Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Kawasan Permukiman	50,000,000.00	43,952,852.00	6,047,148.00	87.91
		Review Penyusunan DED Penanganan Kawasan Kumuh	50,000,000.00	49,800,000.00	200,000.00	99.60
9	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas	113,465,000.00	102,584,458.00	10,880,542.00	90.41
		Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	600,000,000.00	584,794,393.00	15,205,607.00	97.47

Kendal, Desember 2018

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman

M. NOOR FAUZIE, ST MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641225 198802 1 013

Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Sisa Anggaran	Capaian Kinerja (%)				
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)						
PERUMAHAN										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa Surat menyurat	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85,000,000.00	71,929,625.00	13,070,375.00	84.62				
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	11,500,000.00	6,938,925.00	4,561,075.00	60.34				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	15,000,000.00	14,410,000.00	590,000.00	96.07				
		Penyediaan alat tulis Kantor	75,000,000.00	69,838,000.00	5,162,000.00	93.12				
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	18,500,000.00	15,041,500.00	3,458,500.00	81.31				
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000.00	4,740,000.00	260,000.00	94.80				
		Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000.00	22,603,500.00	2,396,500.00	90.41				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	207,056,452.00	205,748,861.00	1,307,591.00	99.37				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan aset peralatan dan mesin	179,568,000.00	174,152,000.00	5,416,000.00	96.98				
		pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Mesin	50,000,000.00	49,760,400.00	239,600.00	99.52				
		Pemeliharaan rutin / berkala aset tetap lainnya	170,000,000.00	165,601,065.00	4,398,935.00	97.41				
4	Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	13,142,500.00	12,629,500.00	513,000.00	96.10				
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12,500,000	11,427,000.00	1,073,000.00	91.42				
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10,000,000.00	9,348,000.00	652,000.00	93.48				
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	33,897,000.00	33,344,000.00	553,000.00	98.37				
		Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	19,708,000.00	19,708,000.00	-	100.00				
6	Program peningkatan Pelayanan dan Kinerja	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	163,808,000.00	152,460,000.00	11,348,000.00	93.07				
		Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	172,803,000.00	172,800,000.00	3,000.00	100.00				
		Peningkatan kinerja pengelolaan website	43,100,000.00	42,722,500.00	377,500.00	99.12				
		Sosialisasi kinerja SKPD	55,000,000.00	54,932,500.00	67,500.00	99.88				
7	Program Pengembangan Perumahan	Operasional Pokja Perumahan	1,348,112,800.00	1,185,730,917.00	162,381,883.00	87.95				
		Pendataan Perumahan Rakyat	450,000,000.00	433,807,922.00	16,192,078.00	96.40				
		Operasional pengelolaan rusunawa	1,009,949,000.00	915,474,237.00	94,474,763.00	90.65				
		Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa	87,918,000.00	86,906,000.00	1,012,000.00	98.85				

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Sisa Anggaran	Capaian Kinerja (%)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	550,251,200.00	515,569,636.00	34,681,564.00	93.70
		Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum	164,000,000.00	152,551,760.00	11,448,240.00	93.02
		Pendataan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan	120,000,000.00	115,347,500.00	4,652,500.00	96.12
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa	150,000,000.00	147,367,000.00	2,633,000.00	98.24
		Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	450,936,100.00	431,070,160.00	19,865,940.00	95.59
		Migrasi tarif dasar listrik Rusunawa dari pasca bayar menjadi pra bayar	225,000,000.00	224,043,800.00	956,200.00	99.58
8	Program Lingkungan sehat perumahan	Penunjang Kawasan Kumuh	50,000,000.00	47,688,950.00	2,311,050.00	95.38
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	1,625,000,000.00	1,526,160,815.00	98,839,185.00	93.92
9	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas	88,863,600.00	76,049,450.00	12,814,150.00	85.58
		Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	288,000,000.00	282,551,609.00	5,448,391.00	98.11

Kendal, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

M. NOOR FAUZIE, ST MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19641225 198802 1 013

No	Nama Kegiatan	Prosentase	Penyebab Kurang 100%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.62	Silpa
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.34	Silpa
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	96.07	Silpa
4	Penyediaan alat tulis Kantor	93.12	Silpa
5	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	81.31	Silpa
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	94.80	Silpa
7	Penyediaan makanan dan minuman	90.41	Silpa
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	99.37	Silpa
9	Pengadaan aset peralatan dan mesin	96.98	Silpa
10	pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Mesin	99.52	Silpa
11	Pemeliharaan rutin / berkala aset tetap lainnya	97.41	Silpa
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	96.10	Silpa
13	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan lkhtisar realisasi Kinerja SKPD	91.42	Silpa
14	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	93.48	Silpa
15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	98.37	Silpa
16	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	93.07	Silpa
17	Peningkatan kinerja pengelolaan website	99.12	Silpa
18	Sosialisasi kinerja SKPD	99.88	Silpa
19	Operasional Pokja Perumahan	87.95	Silpa
20	Pendataan Perumahan Rakyat	96.40	Silpa
21	Operasional pengelolaan rusunawa	90.65	Silpa
22	Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa	98.85	Silpa
23	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	93.70	Silpa
24	Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum	93.02	Silpa
25	Pendataan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan	96.12	Silpa
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa	98.24	Silpa
27	Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	95.59	Silpa
28	Migrasi tarif dasar listrik Rusunawa dari pasca bayar menjadi pra bayar (token)	99.58	Silpa
29	Penunjang Kawasan Kumuh	95.38	Silpa
30	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	93.92	Silpa
31	Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas	85.58	Silpa
32	Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	98.11	Silpa

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal di susun sebagai bentuk dukungan sistem administrasi yang dapat memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan ini adalah sebagai feed back yang dapat digunakan bagi manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan, pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Dari pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, baik visi, misi, tujuan, sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan cara pencapaian tujuan setelah dilaksanakan evaluasi kinerja di dapatkan nilai capaian kebijaksanaan seperti terlampir.

**KEPALA DINAS PERUAMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL**

MOCHAMAD NOOR FAUZIE, ST. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581207 198603 1 014

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2018

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	1 Jumlah materai yang tersedia dalam 1 th (lembar)	725 bh	725 bh	100 %	
		2 Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan air, listrik, dan telepon (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		3 Jumlah STNK dan TNKB kendaraan dinas/ operasional yang dibayar (unit)	46 bh	46 bh	100 %	
		4 Jumlah bulan terpenuhinya alat kebersihan dan bahan pembersih (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		5 jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		6 Jumlah bulan barang cetakan yang dibayar (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		7 Jumlah bulan bahan bacaan yang dibayar (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		8 Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (pak)	544 pak	544 pak	100 %	
		9 Jumlah bulan adanya mobilisasi dalam dan luar daerah (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		10 Jumlah tersedianya aset peralatan dan mesin (unit)	27 unit	27 unit	100 %	
		11 Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara secara rutin/ berkala (unit)	51 unit	51 unit	100 %	
		12 Jumlah Bangunan dan Gedung kantor yang terpelihara (unit)	1 unit	1 unit	100 %	
		13 Jumlah bulan kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		14 jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja (laporan)	12 dok	12 dok	100 %	
		15 jumlah buku laporan akhir tahun yang dibuat (buku)	5 bk	5 bk	100 %	
		16 jumlah evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan (laporan)	12 dok	12 dok	100 %	

	1	2	3	4	5	6
		17 jumlah dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang tersusun (dokumen)	1 dok	1 dok	100 %	
		18 Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		19 Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		20 jumlah website Dinas Perkim yang terpelihara (paket)	1 pkt	1 pkt	100 %	
		21 penyampaian program dan kegiatan dinas perkim kepada masyarakat (keg)	1 pkt	1 pkt	100 %	
2	Meningkatnya SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas	1 Jumlah PDH yang dibayar (1 stel)	45 stel	45 stel	100 %	
		2 Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	55 org	55 org	100 %	
		3 Jumlah personil yang dikirim mengikuti Bimtek dan pelatihan (org)	10 org	10 org	100 %	
3	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	1 Jumlah keg sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan (keg)	1 keg	1 keg	100 %	
		2 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasional pokja perumahan (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		3 Jumlah dokumen data perumahan yang tersusun (dokumen)	1 dok	1 dok	100 %	
		4 Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)	1 dok	0 dok	0 %	
		5 Tersedianya Perda PSU Perumahan	1 dok	1 dok	100 %	
		6 Jumlah bulan tersedianya biaya operasional pengelolaan rusunawa (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		7 Jumlah bulan tersedianya perlengkapan kerja rusunawa (bulan)	12 bln	12 bln	100 %	
		8 Jumlah unit gedung yang disempurnakan (unit)	1 unit	1 unit	100 %	
		9 Jumlah bulan terlaksananya penunjang kegiatan penyempurnaan sarana prasarana rusunawa (bulan)	12 bulan	12 bulan	100 %	
		10 Jumlah sistem informasi yang terbangun (paket)	1 paket	1 paket	100 %	
		11 Jumlah sistem informasi yang terbangun (paket)	1 paket	1 paket	100 %	
		12 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan monitoring dan kegiatan bantuan RTLH yang terlaksana (bulan)	12 bulan	12 bulan	100 %	

1	2	3	4	5	6
	13 Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi aset PSJ Perumahan yang berhasil diserahterimakan (bulan)	12 bulan	12 bulan	100 %	
	14 Jumlah dokumen study pemilihan lokasi untuk perumahan daerah PNS	1 dok	1 dok	100 %	
	15 Jumlah dokumen Kajian lingkungan rusunawa kebondalem Kab Kendal	1 dok	1 dok	100 %	
	16 Jumlah unit instalasi listrik yang terpasang	1 unit	1 unit	100 %	
	17 Jumlah bulan tersedianya biaya operasional kegiatan penunjang kawasan kumuh (bulan)	12 bulan	12 bulan	100 %	
	18 Jumlah sistem informasi yang dibuat (paket)	1 paket	1 paket	100 %	
	19 Jumlah DED Penanganan Kawasan Kumuh yang di review	1 dok	1 dok	100 %	
	20 Jumlah orang yang difasilitasi dalam penyediaan rumah (org)	100 org	100 org	100 %	
	21 Jumlah desa yang meningkat kualitas kawasan permukiman (desa/ kel)	57 desa	57 desa	100 %	

Kendal, Desember 2018

KEPALA DINASPERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL

MOCH NOOR FAUZIE,ST,MT

Pembina Utama Muda
NIP.1964.1225.198802.1.003